

Minutes of Meeting
Pertemuan ke - 4 RSPO INA HCV Taskforce

Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : 09.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Salak, Bogor

Peserta Pertemuan	
<p><u>Fauna & Flora Indonesia</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Cahyo Nugroho <p><u>PT SMART</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Ismu Zulfikar Firmansyah <p><u>Wilmar International</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Syahrial Anhar Harahap <p><u>Asosiasi Amanah</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Edy Sumarmin <p><u>SETARA Jambi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rukaiyah Rafiq <p><u>Sawit Watch</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Mario 	<p><u>Goodhope</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Wilton Simanjuntak <p><u>DSL A</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Kristianto Silalahi Fetrycia Angela <p><u>Fasilitator</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Darmawan Liswanto <p><u>RSPO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Djaka Riksanto Fina <p><u>Pengamat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Andini Desita, LIPI V. Yogasaki, IPB

Item	Deskripsi
1	<p>Pembukaan</p> <p>Pertemuan dibuka oleh Co-chair HCV Task Force Indonesia.</p>
2	<p>Presentasi Legal Review oleh DSLA</p> <ol style="list-style-type: none"> DSL A memaparkan beberapa hasil Kajian Hukum mengenai Legalitas Dokumen Pemanfaatan Lahan Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/XIII/2015 dan Prinsip dan Kriteria Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Beberapa poin yang disampaikan dalam diskusi hasil kajian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Apabila ditemukan HCV di dalam HGU, pihak perusahaan dapat menginformasikan kepada Pemda dan mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama pengelolaan. Kajian legal terkait dengan HCV pernah dilakukan sebelumnya. RSPO dapat memberikan hasil kajian hukum ini kepada konsultan sebagai referensi. Terdapat pengecualian implementasi keputusan MK No. 138/2015 bagi perorangan, misalnya ketika HCV ditemukan di areal milik petani. Namun demikian, perlu dilihat kembali skala dan konteksnya. Apabila aktivitasnya masif, maka perlu dipikirkan bersama penanganannya. Selain itu, apabila kegiatannya di luar konteks pemanfaatan kawasan perkebunan, maka dapat dikategorikan sebagai

Item	Deskripsi
	<p>ketidapatuhan.</p> <p>iv. Keputusan MK No. 138/2015 berlaku langsung, namun apabila implementasinya membutuhkan peraturan pelaksanaan, maka dapat dilakukan sambil menunggu disahkannya peraturan pelaksana tersebut atau diberi batas waktu hingga pemenuhan harus dilakukan.</p> <p>Hal ini berarti, keputusan MK No. 138 hanya berlaku untuk perusahaan yang baru mengajukan ijin perkebunan setelah keputusan tersebut dikeluarkan. Namun demikian, keputusan ini tidak serta merta berlaku untuk kondisi eksisting, sehingga perusahaan yang telah mengajukan proses perijinan sebelum berlakunya keputusan MK tersebut masih dapat menggunakan peraturan yang lama sampai peraturan pelaksana diberlakukan.</p> <p>v. Pada prakteknya, kepatuhan terhadap hukum sangat sulit dilakukan di lapangan. RSPO perlu mencari cara untuk mengakomodir konsep 'beyond the law' tanpa melanggar hukum dan agar perusahaan dapat mengimplementasikan dengan P&C dengan nyaman.</p> <p>Konsep <i>sustainability</i> dapat dilakukan, meskipun payung hukum belum ada. RSPO dapat menginformasikan konsep ini kepada instansi yang relevan sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang sama.</p> <p>vi. NPP perlu diperbaharui dengan Keputusan MK No. 138/2015.</p>
<p>3</p>	<p>Tabel klasifikasi Isu HCV di Indonesia</p> <p>Sesuai dengan rekomendasi Task Force, Sekretariat telah mengelompokkan isu HCV yang telah diidentifikasi berdasarkan pihak-pihak terkait.</p> <p>Tabel klasifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1.</p>
<p>4</p>	<p>Schedule Pertemuan INA HCV Task Force</p> <p>i. Anggota INA HCV Task Force sepakat untuk melakukan beberapa perubahan pada schedule pertemuan Task Force. <i>Update</i> schedule pertemuan INA HCV Task Force dapat dilihat pada Lampiran 2.</p> <p>ii. Perlu dilakukan cross-reference analysis terhadap common guidance untuk Management Monitoring HCVRN 2013 dengan Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia yang disusun oleh HCV RIWG di tahun 2014. Selanjutnya Task Force mengusulkan Dwi Rahmad Muhtaman dari Remark Asia sebagai konsultan untuk melakukan analisis yang dimaksud.</p> <p>Hasil analisis cross-reference ini ditargetkan untuk diselesaikan pada pertengahan bulan Juli 2017.</p> <p>iii. Untuk kegiatan field trial yang direncanakan pelaksanaannya pada bulan Oktober 2017,</p>

Item	Deskripsi
	perlu didukung dengan penyebaran dan pengisian formulir angket penilaian.
5	<p>Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> i. DSLA akan memasukkan isu-isu yang telah dibahas bersama dengan Task Force ke dalam laporan kajian. Perubahan pada laporan kajian akan dibahas lebih lanjut pada rapat internal RSPO dan DSLA. DSLA akan menyampaikan perbaikan laporan kajian kepada RSPO dan INA HCV Task Force. ii. INA HCV Task Force untuk segera memfinalkan Code of Conduct Task Force. iii. RSPO akan menghubungi Remark Asia untuk mendapatkan konfirmasi. Task Force akan menunjuk Daemeter atau Aksenta sebagai alternatif apabila Pak Dwi tidak berkenan.